

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Kencana Prenada Media Group, 2014
- Arikunto. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Reneka Cipta, 2002
- Bungin, Burhan. *Analisa Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada., 2003.
- Fajar, Mukti & Achmad Yulianto. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaanya*. Jakarta: Djambatan. 2003
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Limbong, Benhar. *Konflik Pertanahan*. Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012
- Lubis, Yamin & Lubis Abd. Rahim. *Hukum Pendaftaran Tanah Bandung*: Penerbit CV Mandar Maju, 2012
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cetakan ke VII. Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2011
- Mertokusumo, Sudikno dan Pito A. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Cet Ke I Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Muchsin. *Aspek Kebijaksanaan Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Muhajir, Noeng H. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998
- Parlindungan, A.P. *Komentar Undang-undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju, 1998
- _____. *Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 1998
- Perangin, Effendi. *Hukum Agraria Indonesia. Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994
- Projodikoro, Wiryono. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumber Bandung, 1981
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*. Jakarta: Media Group, 2012
- Sihombing, B.F. *Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 2004
- Sodiki, A. *Hak Menguasai Tanah oleh Negara*. Moh Bakri, 2011
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri. *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Soekanto, Soerjono dan Taneko Soleman B. *Hukum Adat Indonesia*. Cetakan Ke IV, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001

- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014
- Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan Tanah: Antara Regulasi dan Implementasi*. Cetakan 1. Jakarta: Kompas, 2001
- Supriadi. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Rafika, 2007
- Tehupeiory Aartje, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2012.
- Usman Husaini dan Purnomo Akbar Setiady. *Metodologi penelitian sosial* Jakarta: Bumi aksara, 1996

Jurnal

- Benuf Kornelius, Azhar Muhamad. *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011) Volume 7 Edisi I, Juni 2020. Universitas Diponegoro, 2020
- Gumabo Elsy Aprilia. "Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1960". *Lex Administratum*. Vol.II Nomor 3 Juli-Oktober, 2014
- Leks Eddy Marek, S.H., M.H., ACI Arb. "Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Perumahan Rakyat". Jakarta, 2013
- Lianton Vicco Yuniar. "Wewenang Pemerintah dalam Penentuan Kriteria Tanah Terlantar". *Jurist-Diction*. Vol. 2 Nomor 6, November 2019. Universitas Airlangga, 2019
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum". *Yuridika* Vol.16. Nomor 1. Maret-April. 2001
- Pujiwati Yani, "Kedudukan Surat Izin Perumahan (Sip) Dalam Kerangka Hukum Perumahan Di Indonesia". *Bina Hukum Lingkungan*. Vol 2 Nomor 2 April, 2018
- Supriyanto, "Kriteria Tanah Terlantar". *Jurnal Dinamika Hukum* Vol 10 Nomor 1 Januari, 2010
- WEH Blum. 1993. Eijsackers. HJP; Hamers, T. "Konsep Perlindungan Tanah dari Dewan Eropa dan Penelitian Tanah Terpadu. Tanah dan Lingkungan" *Vol 1*. Penerbit Akademik Kluwer, 1993

Skripsi dan Tesis

- Hamonangan Sobardo. Hakikat Perlindungan Hukum Bagi Pekerja/Buruh Dalam Sistem Pengupahan Pada Perusahaan Perkebunan. *Ringkasan Disertasi*.

- Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makassar, atau dapat juga dilihat pada Melkias Hetharia, 2010, Hak Asasi Manusia Suatu Pengembangan Konsep Ideal di Indonesia, Bandung: LoGos Pulishing, 2015
- Kurniawan Heru Yudi. Tinjauan Yuridis Pemanfaatan Tanah Terindikasi Terlantar Untuk Kegiatan Produktif Masyarakat (Meningkatkan Taraf Perekonomian) Di Tinjau Dari PP No. 11 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. *Program Magister Ilmu Hukum* Universitas Tanjungpura. Angkatan XI, 2020
- Mahligai, Andhi. Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Melalui Mediasi Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. *Tesis*. Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2013
- Sari Liani. *Akibat Hukum Terhadap Pemilik Hak Atas Tanah Yang Tanahnya Diterlantarkan. Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua, 2017

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1958 Tentang Urusan Perumahan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1962 Tentang Pokok-Pokok, Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 40) Menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan Dan Permukiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1958 Tentang Penyerahan Tugas Urusan Perumahan Kepada Daerah Tingkat Ke-I.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1960 Tentang Perubahan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1958 (Lembaran Negara 1958 No. 43).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 Tentang Pokok-Pokok Perumahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1963 Tentang Pokok-Pokok Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perumahan.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia No 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1981 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1963 Tentang Hubungan Sewa-Menyewa Perumahan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1994 Tentang
Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran
tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Pemanfaatan dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang
Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Kamus

Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Pusat
Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008

Garner Bryan A. (editor), *Black's Law Dictionary*, Eighth Edition, Thomson West,
St.Paul, 2004

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Website

Safrin Salam, “Kepastian Hukum Penerbitan Sertifikat Hak Komunal Sebagai
Pelaksanaan Reformasi

Agraria” <<https://media.neliti.com/media/publications/96252-ID-kepastian-hukum-penerbitan-sertifikat-ha.pdf>>, Diakses pada tanggal 20 Oktober 2020

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 318/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 26/PDT/2017/PT.DKI

Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 1054 K/Pdt/2018

Putusan Peninjauan Kembali Nomor 157 PK/Pdt/2020